



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. ABDUL KOBIR
2. Jabatan : CHIEF CHANGE MANAGEMENT OFFICERS II
3. NHK : 480520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **685.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/223 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/110 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/140 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, LAINNYA Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **286.686.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 156.006.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.100.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 122.580.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.146.040.400**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **177.758.714**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.295.485.114**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.295.485.114

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.